

Pelaksanaan program relawan demokrasi basis perempuan sebagai fasilitator pendidikan pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai

Hambali ^{a,1}, Hariyanti ^{b,2*}, Ahmad Eddison ^{c,3}, Salmawati ^{d,4}

^{a,b,c} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau

² hariyanti@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program relawan demokrasi basis perempuan sebagai fasilitator pendidikan pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Peranan KPU dilihat dari tiga tahapan yakni pada perekrutan, pelatihan/pembekalan relawan demokrasi, dan evaluasi kegiatan pendidikan pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan penelitian melalui teknik *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) Perekrutan relasi berasal dari masyarakat umum dan penentuan basis/segmen kerja relasi ditentukan oleh KPU setelah melalui proses wawancara. Hal ini mengakibatkan tidak semua relasi yang lulus seleksi merupakan orang yang aktif dalam komunitas target, hal lainnya adalah kurangnya pemahaman relasi terhadap basis target; 2) pelatihan/ pembekalan relasi dilakukan sekali, yang disertai dengan pelantikan, sehingga terdapat beberapa relasi yang kurang memahami materi ke pemilu khususnya mengenai teknis ke pemilu. Selain itu, juga tidak diberikan materi khusus terkait dengan segmen target seperti gender dan politik dan *affirmative action* di Indonesia; 3) Pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih oleh relasi perempuan, dilaksanakan di pengajian/wirid ibu-ibu, arisan RT/RW, kelompok senam dan perkumpulan dharma wanita; dan 4) Evaluasi kegiatan relasi dilakukan terhadap laporan kegiatan pendidikan pemilih, di akhir masa tugasnya, relasi diberikan sertifikat penghargaan. KPU merupakan inisiator sekaligus pengelola program relawan demokrasi sehingga memiliki tanggung jawab membangun literasi politik khususnya mengenai ke pemilu, sebab ketika turun ke lapangan sebagai fasilitator pendidikan pemilih, relasi merupakan role model dan sumber informasi bagi komunitas target.

Kata kunci: *peranan KPU, relawan demokrasi, basis perempuan, pendidikan pemilih.*

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of women's basic democracy volunteer programs as facilitators of voter education in Pekanbaru City and Dumai City. The role of the KPU is seen in three stages namely recruitment, training / debriefing of democratic volunteers, and evaluating voter education activities. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Determination of research informants through non-probability sampling techniques with purposive sampling techniques. The data validity testing technique uses triangulation of data sources. The research findings show that 1) Recruitment of democracy volunteer comes from the general public and the determination of the working basis / segment of democracy volunteer is determined by the KPU after going through the interview process. This results in not all relationships that pass the selection being active people in the target community, another thing is the lack of understanding of the democracy volunteer to the target base; 2) training / debriefing is done once, which is accompanied by an inauguration, so that there are some democracy volunteers that do not understand electoral material, especially regarding electoral techniques. In addition, special materials were not provided related to target segments such as gender and politics and affirmative action in Indonesia; 3) The implementation of voter education activities by women's democracy volunteer is carried out in the Koran recitation / gathering, RT / RW social gathering, gymnastics group and Dharmawanita association. 4) Evaluation of relation activities is carried out on the voter education activity report, at the end of his term of service, the democracy volunteer is given a certificate of appreciation. KPU is the initiator and manager of the volunteer democracy program so that it has the responsibility of building political literacy, especially regarding electoral, because when it comes to the field as a voter education facilitator, democracy volunteer are role models and sources of information for the target community.

Keywords: *role of KPU, volunteer democracy, women's base, voter education.*

Copyright ©2020 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu indikator/nilai-nilai demokrasi adalah pergantian pemimpin dilaksanakan secara berkala melalui pemilihan umum (Budiardjo, 2007).

Dalam UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) dinyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Kemudian, pada ayat (2) diatur bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Pasal 6 diatur bahwa “KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN” (Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017). Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu tugas KPU adalah melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Pendidikan pemilih merupakan usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian. Pendidikan pemilih memiliki tujuan sebagai berikut: 1) meningkatkan partisipasi politik warganegara; 2) meningkatkan literasi politik; 3) meningkatkan sikap kerelawanan pemilih (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2016). Artinya, Pendidikan pemilih bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, proses pemilihan umum dan makna serta pentingnya pemilihan umum di dalam negara demokrasi Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Pendidikan pemilih tidak hanya menekankan pengetahuan seputar teknis pemberian suara namun lebih daripada itu yakni bagaimana pemilih dapat berpartisipasi aktif dalam jalannya pemilu. Berpartisipasi aktif disini maksudnya mereka dapat memahami makna serta mekanisme pemilu tersebut sehingga dapat mengawasi jalannya pemilu. Hal ini tentunya akan menciptakan pemilih yang cerdas dan pemilu yang berkualitas (Hariyanti, 2015, hal. 25). Guna mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa strategi pendidikan pemilih salah satunya melalui Program Relawan Demokrasi.

Program Relawan Demokrasi, selanjutnya disebut Relasi adalah sebuah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Dalam perekrutannya, program ini melibatkan peran serta masyarakat, dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Program Relasi yang digagas oleh KPU RI melibatkan kelompok masyarakat yang

berasal dari 10 basis pemilih strategis, diantaranya ialah basis pemilih perempuan. Pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Relasi kepada basis pemilih perempuan dipandang strategis mengingat beberapa hal yakni: 1) Relasi merupakan program nasional sehingga daya jangkauannya bersifat luas dan massif dalam menyampaikan informasi kepemiluan dan demokrasi. Semakin luas informasi yang disampaikan semakin banyak pemilih perempuan yang teredukasi secara politik; 2) Relasi merupakan sebuah gerakan kesukarelaan dari pemilih untuk pemilih, dengan mengedukasi sesama (dalam komunitasnya) mengenai konsep kepemiluan dan demokrasi diharapkan informasi kepemiluan akan tersampaikan dengan baik melalui bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami masyarakat; 3) terdapat banyak perkumpulan perempuan di masyarakat baik yang bersifat formal seperti organisasi perempuan PKK dan Dharma wanita maupun yang tidak formal seperti arisan dan yasinan. Relasi dapat berasal dari kelompok-kelompok tersebut sehingga informasi kepemiluan dan demokrasi yang disampaikan dapat dicerna dengan baik dalam nuansa santai. Artikel ini akan menganalisis lebih jauh mengenai pelaksanaan program relawan demokrasi basis perempuan yang meliputi proses rekrutmen, pelatihan/pembekalan, pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih dan evaluasi kegiatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan pada relawan demokrasi basis pemilih perempuan di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono (2013, hal. 305) *human instrument* berfungsi sebagai menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penentuan informan penelitian melalui teknik *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relawan demokrasi (Relasi) dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat pada empat pemilu nasional terakhir yakni pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%), pemilu 2009 (71%) dan pemilu 2014 (73%). Buku Pedoman

Pelaksanaan Relasi Pemilu 2019 menyatakan bahwa Relasi bertujuan sebagai berikut: 1) meningkatkan kualitas proses pemilu; 2) meningkatkan partisipasi pemilih; 3) meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; dan 4) membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019). Relasi memiliki 10 basis/kelompok sasaran dalam kegiatan pendidikan pemilih. Pemilih perempuan satu diantaranya. Pelaksanaan program relasi basis perempuan sebagai fasilitator pendidikan pemilih memiliki beberapa tahapan yang umumnya sama dengan basis lainnya namun implikasi yang dihasilkan berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan temuan yang akan dijelaskan melalui poin-poin berikut ini.

Perekrutan relasi basis perempuan

Proses perekrutan merupakan proses awal dari program relasi. Berdasarkan juknis relasi (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), diatur beberapa persyaratan relasi diantaranya 1) Warga Negara Indonesia; 2) Dilarang untuk merekrut anak/saudara/sanak famili tanpa ada kompetensi; 3) Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun; 4) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; 5) Berdomisili di wilayah setempat; 6) Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak menjadi anggota Partai Politik; 7) Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu; 8) Terdaftar sebagai pemilih; 9) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 10) Bertanggungjawab dan berakhlak baik; 11) Bukan bagian dari penyelenggara pemilu; 12) Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan; 13) Membuat program kerja yang akan dilaksanakan; 14) Bagi peserta yang pernah mengikuti kegiatan KPU (Kursus Kepemiluan/Jambore Demokrasi/KPU Goes to Campus/School/Pesantren memperoleh prioritas. Persyaratan tersebut diatur guna mendapatkan relawan yang tangguh, cakap, berpengalaman atau memahami situasi lapangan karena mengetahui komunitas sasaran, serta menghindari konflik kepentingan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen relasi sudah mengikuti juknis yang diatur oleh KPU RI. Perekrutan relasi bersifat terbuka untuk umum. Penempatan basis sasaran kerja relasi ditentukan oleh KPU setelah melalui proses wawancara seperti di KPU Kota Pekanbaru. Namun, hal berbeda terjadi di Kota Dumai dimana penempatan relasi dipilih sendiri oleh pendaftar, namun keputusan akhir tetap

berada di tangan KPU. Dari beberapa relasi basis perempuan yang diwawancarai, baik yang menentukan maupun ditentukan basis kerjanya, ada yang menyatakan tidak aktif dalam komunitas sasaran apalagi menjadi pengurus. Hal ini tentu mengakibatkan beberapa hal yakni: 1) kurangnya pemahaman relasi terhadap basis sasarannya; 2) kurangnya ikatan emosional antara relasi dengan komunitas sasaran. Seperti yang diketahui bahwa konsep relasi adalah sebuah gerakan kesukarelaan dari pemilih untuk pemilih, dengan mengedukasi sesama (dalam komunitasnya) mengenai konsep kepemiluan dan demokrasi diharapkan informasi kepemiluan akan tersampaikan dengan baik melalui bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami masyarakat.

Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa beberapa relasi basis perempuan mengikuti seleksi untuk mengisi waktu luang, iseng-iseng dan diajak teman. Motivasi ini tentu sangat disayangkan mengingat Relawan demokrasi memiliki peranan vital dalam penyebaran informasi kepemiluan, namun untuk partisipasi mereka menjadi relawan patut diapresiasi ditengah melemahnya semangat berdemokrasi yang ditandai dengan tingginya angka golput dan pesimisme masyarakat terhadap kinerja dan system politik.

Pelatihan/pembekalan

Menurut Santoso (2010), pelatihan adalah suatu kegiatan yang direncanakan oleh suatu kelompok, lembaga atau institusi untuk memfasilitasi proses belajar seseorang atau kelompok untuk mencapai kompetensi tertentu. Selain itu, pelatihan juga merupakan proses menjadikan individu atau organisasi menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Sebagai fasilitator pendidikan pemilih, jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh relasi adalah pelatihan keterampilan (*skill based training*), yakni sebuah pelatihan mengenai pengenalan atau pendalaman keterampilan seseorang, kelompok, organisasi atau lembaga baik secara teknis (*hard skill*) maupun secara non teknis (*hard skill*) yang lebih bersifat pada pengembangan pribadi (*soft skill*). Keterampilan sebagai fasilitator masuk dalam kriteria *soft skill*, dimana pengukurannya cukup sulit dilakukan sebab bersifat kualitatif untuk melihat pemahaman peserta pelatihan.

Pelatihan relawan demokrasi merupakan suatu kegiatan yang disusun, direncanakan dan dilaksanakan KPU untuk memberikan pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan membangun militansi dan semangat kerelawanan untuk menjadi fasilitator pendidikan pemilih. Dalam pelatihan/pembekalan terhadap relasi,

adapun materi yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi relasi dalam menjalankan tugasnya adalah 1) Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi; 2) Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis; 3) Kode etik relawan; 4) Teknik-teknik berkomunikasi public; 5) dan Materi lain yang relevan (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan/ pembekalan relasi dilakukan sekali, yang disertai dengan pelantikan, sehingga terdapat beberapa relasi yang kurang memahami materi kepemiluan khususnya mengenai teknis kepemiluan. Relasi merupakan anggota masyarakat yang memiliki keinginan untuk turut serta dalam proses kepemiluan, baik secara sadar/inisiatif sendiri maupun berasal dorongan dari orang lain/ikut teman/iseng-iseng, umumnya mereka tidak berasal dari latar belakang pegiat pemilu atau organisasi pemantau pemilu tetapi berasal dari lintas profesi seperti guru, wiraswasta, mahasiswa bahkan ibu rumah tangga. Pelatihan yang diberikan sekali dirasa kurang cukup untuk memberikan pemahaman seputar kepemiluan apalagi yang bersangkutan dengan hal teknis kepemiluan seperti cara penghitungan DPT, Pembagian pemerolehan kursi, proses dan regulasi pidana pemilu di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan program relasi basis perempuan

Dalam juknis relasi (2019), diatur bahwa Agenda kegiatan relawan demokrasi meliputi: 1) Memetakan varian kelompok sasaran (mapping); 2) Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran; 3) Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan; 4) Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain; 5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; 6) Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan relasi dimulai pada awal bulan Februari 2019 hingga awal April 2019, sehingga kegiatan pendidikan pemilih relasi hanya selama kurang lebih dua bulan. Berdasarkan laporan kegiatan relasi basis perempuan, jumlah kegiatan pendidikan pemilih dilaksanakan sebanyak 15 kali di beberapa tempat. Komunitas sasaran biasanya pada acara pengajian/wirid ibu-ibu, arisan RT/RW, Dasawisma dan Dharmawanita serta kelompok senam ibu-ibu. Wilayah kerja relasi adalah kota pekanbaru dan kota dumai, dengan masa kerja yang sempit dan wilayah kerja yang cukup luas menyebabkan beberapa hal berikut: 1) kegiatan pendidikan pemilih pada komunitas perempuan tidak dapat dilakukan merata di seluruh

kecamatan apalagi pada daerah-daerah pinggiran, 2) kendala jadwal kegiatan komunitas yang seringkali bergeser sehingga menyebabkan sosialisasi urung dilakukan, dan sulit diganti dengan hari lahir mengingat masa kerja yang sempit. Kendala tersebut juga terungkap dalam hasil penelitian Buce (2019) dan Arimbi Sinulingga (2015) bahwa faktor wilayah kerja yang luasa dan ketepatan waktu dan factor keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki relasi mempengaruhi kinerja relasi.

Dalam juknis relasi 2019 juga ditentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi tentang 1) Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi; 2) Tanggal, hari dan jam pemungutan suara; 3) Tata cara pemberian suara dalam pemilu; 4) Pengenalan peserta Pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, DPD); 5) Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih. Berdasarkan laporan kegiatan relasi basis perempuan, materi yang diberikan jenis pemilu yang akan berlangsung, pengenalan surat suara, tata cara pencoblosan, dan jadwal pemilu. Terkait dengan materi khusus untuk komunitas sasaran tidak diberikan.

Materi khusus pada basis perempuan seharusnya perlu diberikan mengingat beberapa hal. *Pertama*, relasi mempunyai peluang untuk mengembangkan materi khusus basis sasaran sebagaimana yang diatur dalam buku pedoman pendidikan pemilih (2016) bahwa relawan demokrasi diberikan kebebasan untuk mengembangkan materi sepanjang memperkuat keterampilan pemilih dalam mendayagunakan demokrasi untuk kepentingan publik. Seperti yang terungkap dalam hasil penelitian Fuad (2015, hal. 6) pada Relasi Kabupaten Banyumas, materi lain yang diberikan seperti hubungan antara politik uang dan pemilu dan modus politik uang yang kemungkinan akan terjadi pada masa kampanye pemilu. Dalam hal isu gender dan politik, Relasi Banyumas meyakinkan kelompok perempuan untuk meyakini bahwa keberhasilan menempatkan representasi perempuan di parlemen sedikit banyak akan mengubah nasib mereka. *Kedua*, konsep relasi adalah pendidikan pemilih dari pemilih (relasi) kepada pemilih (komunitas) sehingga penyampaian materi kepemiluan dan demokrasi dapat disampaikan dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami komunitas.

Pemilih perempuan urgent mendapatkan pendidikan pemilih karena beberapa pertimbangan yakni 1) masih adanya dikotomi antara perempuan dan politik. Politik

dipersepsikan sebagai aktivitas yang kejam, jahat, penuh persaingan dan tidak cocok dengan karakteristik kaum perempuan yang digambarkan sebagai pribadi yang lemah lembut, menghindari konflik dan tidak teguh memegang prinsip (Novianti, 2008, hal. 2; Predescu & Darjan, 2010). Persepsi ini seringkali membuat perempuan menarik diri dari hal-hal yang berbau politik termasuk memberikan suara dalam pemilu. Persepsi ini harus diluruskan melalui pendidikan pemilih kepada kaum perempuan bahwa politik merupakan urusan setiap orang dan juga sebagai salah satu aspek sosial yang penting dalam kehidupan manusia karena mempengaruhi berbagai bidang kehidupan; 2) kaum perempuan masih dilihat sebagai objek dalam dunia politik. Kebanyakan pemilih perempuan dikenal sebagai pemilih loyal dan sangat subyektif sehingga seringkali menjadi objek sasaran kontestan pemilu yang bersifat pragmatis (Amin, 2014); 3) Kaum perempuan menempati posisi strategis sebab ia berperan ganda sebagai istri dan juga ibu di rumah, serta anggota dari masyarakat dan perkumpulan lainnya sehingga pengetahuan dan keterampilan yang baik dapat menjadi bekal dalam memberikan edukasi politik bagi lingkungan-lingkungan tersebut (Hariyanti, 2018, hal. 12).

Data tabel tersebut menunjukkan bahwa Relasi juga dapat menjadi stimulus kebijakan *affirmative action* guna mendorong keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif. Relasi menumbuhkan kesadaran perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik, tidak hanya memberikan suara dalam pemilu tetapi juga mendorong keterwakilan politik perempuan di parlemen melalui pemberian suara dukungan kepada politisi perempuan. Tingginya angka partisipasi politik perempuan jika dibarengi dengan kesadaran untuk mensukseskan kebijakan *affirmative action* akan menghasilkan representasi politik perempuan yang tinggi di parlemen.

Evaluasi kegiatan relasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi kegiatan relasi dilakukan terhadap laporan kegiatan pendidikan pemilih, di akhir masa tugasnya, relasi diberikan sertifikat penghargaan. Kinerja relasi khususnya relasi basis perempuan di kota pekanbaru dan kota dumai dinilai berhasil, hal tersebut diketahui dari tingginya angka partisipasi politik perempuan dalam pemilu serentak 2019 di Provinsi Riau.

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Riau

Pemilih	Pemilu Presiden	Pemilu DPD	Pemilu DPRD	Jumlah DPT
Laki-laki	1.630.377 (49,8%)	1.624.470(82,74%)	1.624.165 (82,96%)	1.963.287
Perempuan	1.624.153 (50,2%)	1.635.552 (86,08%)	1.634.913 (85,94%)	1.900.018

(Sumber: KPU Provinsi Riau, 2019)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jumlah pemilih laki-laki lebih besar daripada jumlah pemilih perempuan. Namun dari segi partisipasi, angka partisipasi politik perempuan justru lebih tinggi dari laki-laki sehingga fenomena ini menarik untuk diteliti. Jika dilihat menurut urutan partisipasi politik dalam pemilu 2019, Kota Pekanbaru menempati posisi tertinggi di Provinsi Riau yakni sekitar 93,97%, sementara Kota Dumai, yang tergabung dengan Bengkalis dan Meranti dalam dapil Riau 5 menempati posisi keenam dengan angka partisipasi 82,40% (Susanto, 2019).

KPU merupakan inisiator sekaligus pengelola program relawan demokrasi sehingga memiliki tanggung jawab membangun literasi politik khususnya mengenai kepemiluan, sebab ketika turun ke lapangan sebagai fasilitator pendidikan pemilih, relasi merupakan role model dan sumber informasi bagi komunitas sasarannya.

KESIMPULAN

Relawan demokrasi merupakan sebuah gerakan social untuk melakukan pendidikan pemilih berbasis komunitas. Relawan demokrasi basis perempuan mempunyai peranan strategis dalam pemberdayaan politik kaum perempuan, tidak hanya menghimbau untuk menggunakan hak pilih dan memberi informasi mengenai tata cara pemilihan tetapi lebih jauh dari itu yakni dapat memberikan pengetahuan dan menanamkan kesadaran politik perempuan bahwa politik dan perempuan bukanlah dua hal yang berbeda, mengajak perempuan untuk tidak bersikap apatis bahkan pesimis untuk mau terlibat dan ikut serta dalam urusan politik dan demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis/peneliti mengucapkan terima kasih kepada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan

universitas Riau yang telah membiayai pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada tim peneliti yang turut membantu proses penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2014). Relasi relawan demokrasi dan pemilih pada pemilu tahun 2014. In *Pembekalan Peran Serta Relawan Demokrasi dalam Usaha Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Buce, P. G., & Stefanus, B. P. (2019). Kinerja relawan demokrasi dalam pendidikan pemilih pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 5.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad, Z. M. (2015). Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(1), 23. <https://doi.org/10.22146/jkn.6891>
- Hariyanti. (2015). *Pelaksanaan pendidikan pemilih melalui kerjasama KPU Kota Padang dan MGMP PPKn Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.
- Hariyanti. (2018). *Peranan Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik (Studi Di DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2016). *Panduan Pendidikan Pemilih*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Juknis Relasi)*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Novianti, I. (2008). Dilema kepemimpinan perempuan dalam Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 3(2), 255–261.
- Predescu, M., & Darjan, I. (2010). Promoting political participation through adult education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 3241–3245. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.495>
- Santoso, B. (2010). *Skema dan mekanisme pelatihan: panduan penyelenggaraan pelatihan*. Yayasan Terumbu Karang Indonesia.
- Sinulingga, A. (2015). *Peranan Relawan Demokrasi Terhadap Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Deli Serdang*. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/54005>
- Sugiyono. (2013). *Penelitian campuran*. Alfabeta.
- Susanto, N. N. (2019, Oktober 23). *Potret Partisipasi Pemilih Riau*. RiauPos.co. <https://riaupos.jawapos.com/5677/opini/23/10/2019/potret-partisipasi-pemilih-riau.html>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (2017).